



Judul : Pensiun PNS Masih Dibiayai Dari APBN
Tanggal : Sabtu, 27 Agustus 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Pensiun PNS Masih Dibiayai Dari APBN

PEMERINTAH melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka wacana perubahan skema pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya, pensiunan ASN disinyalir memberikan beban Rp 2.800 triliun terhadap keuangan negara.

Wacana tersebut diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (24/8).

Tak ingin menjadi bola liar, Staf Ahli Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menjelaskan apa yang diutarakan bosnya di hadapan Wakil Rakyat di Senayan.

Dalam akun Twitter pribadinya @prastow, Yustinus menjelaskan, setiap tahunnya Pemerintah mengalokasikan pembayaran pensiun yang dimasukkan dalam pos anggaran belanja pegawai. Tahun 2022 saja, anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp 136,4 triliun.

“Faktanya, tahun 2022 alokasi APBN sebesar Rp 136,4 triliun,” kata Yustinus dikutip, kemarin.

Dia menjelaskan, saat ini pensiun PNS menggunakan Undang-Undang (UU) Nomor 11/1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

UU ini mengatur program Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) untuk PNS. JP menggunakan skema ‘pay as

you go’ yang dibayar pemerintah via Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN).

“Mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 memang demikian, sampai terbentuknya dana pensiun,” kata dia.

Berdasarkan UU tersebut, setiap bulannya, PNS dikenai potongan 8 persen. Rinciannya, 4,75 persen untuk program jaminan pensiun, 3,25 persen untuk program JHT.

Kemudian, iuran 4,75 persen tersebut diakumulasikan sebagai Akumulasi Iuran Pensiun (AIP), dan bukan dana pensiun.

Sementara, iuran 3,25 persen dikelola PT Taspen dan diterima sekaligus saat PNS pensiun.

“Jadi jelas ya, kenapa pensiun jadi beban APBN? Karena sampai saat ini manfaat pensiun PNS Pusat dan Daerah masih dibiayai Pemerintah melalui APBN,” kata Yustinus.

Seperti diketahui, rencana perubahan skema pensiun PNS awalnya akan dilaksanakan tahun 2020. Namun, rencana tersebut batal lantaran pandemi Covid-19.

Sri Mulyani juga mengusulkan perubahan skema pensiun ke *fully funded* agar terjadi pemupukan dana pensiun yang lebih pasti. Hal ini mendapat dukungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ■ NOV